



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa

📍 Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52, Kota Palu  
Kelurahan Biroboli Utara, Kecamatan Palu Selatan,  
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.

📞 0451 - 483 385

📞 0811 4444 064

✉ ptun.palu@gmail.com

🌐 www.ptun-palu.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

Jalan Prof Moh Yamin No 52.Kel.Biroboli Utara.Kec.Palu selatan  
Sulawesi Tengah 94111

Nomor : 95/KPTUN.W4-TUN2/TI1/I/2026

Palu, 9 Januari 2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2025

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

di

Makassar

Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dari satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2025 dengan baik. Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi atas kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi peradilan administrasi negara, serta untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai pencapaian, tantangan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Berbagai inovasi layanan dan perbaikan sistem telah dilakukan, baik dari segi administrasi, teknologi informasi, maupun kualitas sumber daya manusia. Kami berupaya memastikan bahwa setiap perkara yang diterima dapat diselesaikan dengan adil, cepat, dengan biaya ringan, demi tercapainya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, terutama di tengah dinamika perkembangan masyarakat dan kompleksitas perkara yang semakin meningkat, kami terus berupaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menciptakan suasana peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

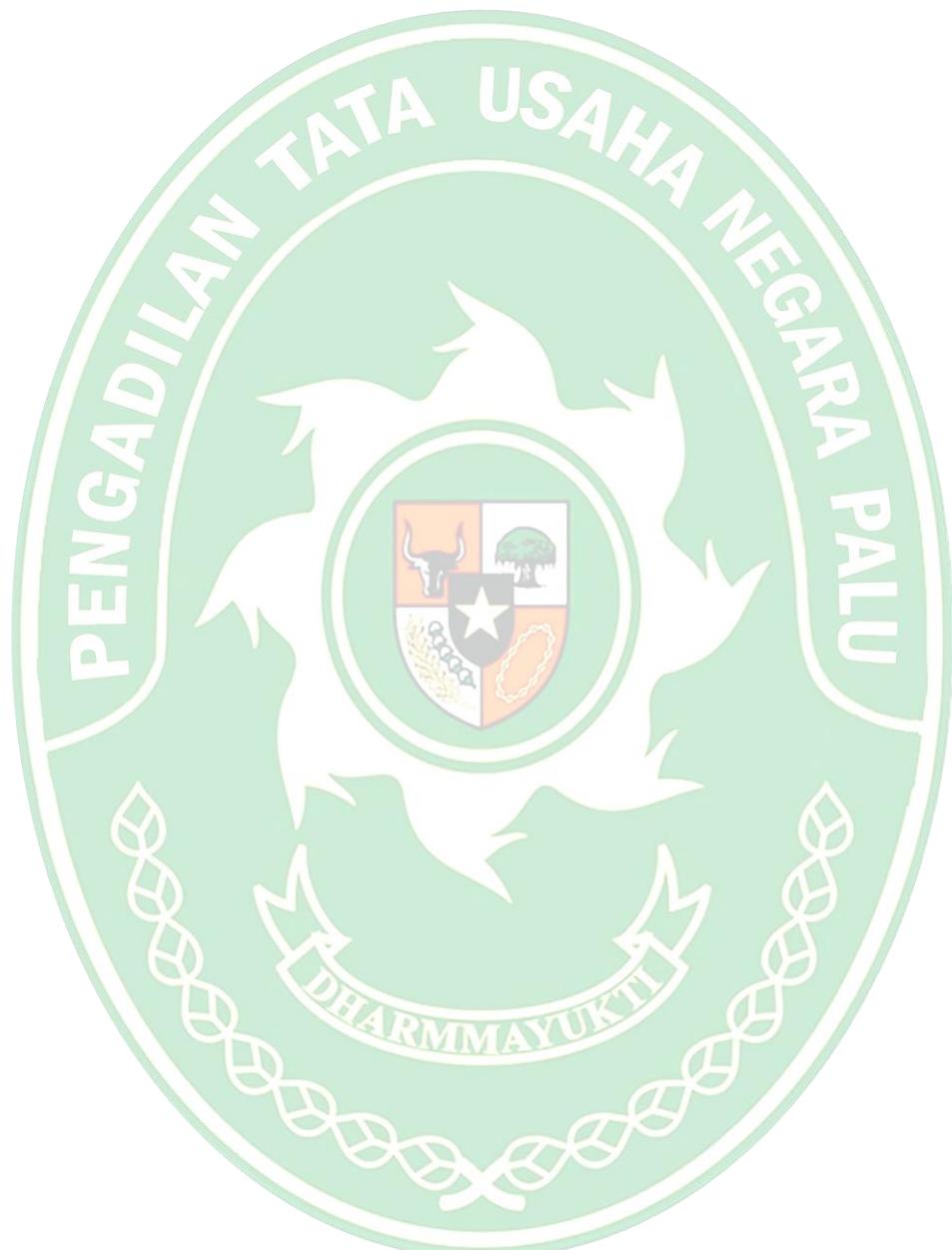
Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Semoga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat terus melangkah maju, memberikan pelayanan terbaik, dan turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>BAB II KEADAAN PERKARA .....</b>	3
A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Palu .....	3
B. Penyelesaian Perkara .....	5
C. Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu .....	5
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	8
A. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial .....	8
B. Profil Sumber Daya Manusia Non Teknis .....	9
C. Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .....	9
D. Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....	10
E. Mutasi .....	11
F. Promosi .....	12
G. Rotasi .....	12
H. Pensiun .....	12
I. Kegiatan yang dilaksanakan/diikuti oleh Aparatur PTUN Palu .....	12
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA &amp; PRASARANA, &amp; TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	29
A. Pengelolaan Keuangan .....	29
B. Pengelolaan Sarana & Prasarana .....	30
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	36
D. Pengelolaan Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 2025 .....	40
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....</b>	41
A. Zona Integritas .....	41
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	43
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	44
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	46
A. Pengawasan Internal .....	46
B. Evaluasi Pengawasan .....	48

<b>BAB VII KESIMPULAN &amp; REKOMENDASI.....</b>	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Rekomendasi.....	50



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama periode tahun 2025. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, memberikan keadilan, serta memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dan instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, hambatan, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan tugasnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku atasan hierarkis yang membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama tahun 2025, serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup laporan ini mencakup berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama tahun 2025, antara lain, keadaan perkara, penyelesaian perkara, pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mengembangkan

berbagai inovasi pelayanan. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai pelaksanaan pengawasan dan penanganan masalah yang timbul, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber internal Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang ada dan menganalisis pencapaian serta tantangan yang dihadapi selama tahun 2025. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama periode yang dilaporkan.

Melalui laporan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam rangka evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi bahan refleksi dan masukan dalam upaya terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ke depan.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### **A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2025 menangani sebanyak 58 perkara yang terdiri dari 15 perkara sisa tahun 2024 dan 45 perkara yang terdaftar di Kepaniteraan pada Tahun 2025, dan 2 perkara cabut. Keseluruhan perkara tersebut diperiksa secara elektronik pada tingkat pertama, selain perkara tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah pula menerima pendaftaran perkara yang diajukan upaya hukum, baik upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, serta pelaksanaan pengawasan eksekusi, sebagaimana dilaporkan pada tabel di bawah ini:

##### ➤ Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2025	Sisa Tahun 2024	Cabut Tahun 2025	Perkara Tahun 2025	Dismissal	Perlawan	Perkara Putus Tahun 2025
1	Pertanahan	13	6	0	19	0	0	14
2	Kepegawaian	5	0	2	3	0	0	3
3	Perizinan	3	0	0	3	0	0	2
4	Tender	2	0		2	1	1	
5	Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	1	0	9	0	0	8
6	Tindakan Administrasi Pemerintah	11	8	0	19	0	0	14
7	Lain-lain	3	0	0	3	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>42</b>

##### ➤ Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Diajukan Banding	Keterangan
1	Pertanahan	5	
2	Kepegawaian	2	
3	Perizinan	1	
4	Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	

5	Tindakan Administrasi Pemerintah	7	
6	Lain-lain	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

➤ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	JENIS PERKARA	DIAJUKAN KASASI	KETERANGAN
1	Pertanahan	5	
2	Kepegawaian	-	
3	Kepala Desa/Perangkat Desa	1	
4	Tindakan Administrasi Pemerintah	3	
5	Lain-lain	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	

➤ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Kepegawaian	1	
2	Tindakan Administrasi Pemerintahan	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

➤ Keadaan Perkara yang dimohonkan Eksekusi

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Kepegawaian	1	
2	Perizinan	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	

## B. Penyelesaian Perkara

Memenuhi laporan akhir tahun 2025 maka klasifikasi perkara sebagaimana data terlampir pada kolom di bawah ini merupakan jumlah sisa perkara yang diputus, jumlah perkara yang diputus tepat waktu, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA YANG DIPUTUS	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
				BANDING	KASASI	PK
1.	Pertanahan	5	8	9	1	14
2.	Kepegawaian	-	2	1	-	2
3.	Perizinan	1	1	1	1	2
4.	Tender/Pengadaan Barang Jasa	1	-	-	-	-
5.	Kepala Desa & Perangkat Desa	1	8	1	-	8
6.	Tindakan Administrasi Pemerintahan	5	8	7	8	7
7.	Lain-lain	1	1	-	1	1
	Jumlah	14	28	19	11	34

## C. Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

### 1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyediakan Posbakum yang melayani pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum, membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjalin Kontrak Kerja sama selama satu tahun berupa *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan Pos Bantuan Hukum yaitu “Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes” untuk melaksanakan *mandatory* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 57 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diantaranya melayani:

- pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Realisasi Penyerapan Tahun 2025 pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

- Posbakum Rp33.000.000
- Realisasi Rp33.000.000
- Sisa Rp0,00
- Belanja Jasa Profesi Rp28.800.000
- Realisasi Rp28.800.000
- Belanja ATK Posbakum Rp4.200.000
- Realisasi Rp4.200.000

## 2. Perkara Prodeo

Prodeo adalah Proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara cuma-cuma dengan dibiayai Negara melalui Anggaran Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam laman resmi tersebut yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan Data Administrasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- b. Surat keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Untuk Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat permohonan untuk perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) sehingga alokasi anggaran prodeo dalam DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu ribu rupiah) tidak terealisasi.

### **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terbagi dalam dua bagian yaitu bagian teknis dan non teknis. Bagian teknis menangani tugas di bidang teknis yudisial Peradilan sedangkan non teknis menangani tugas Kesekretariatan, dibantu Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai penunjang pelaksanaan tugas Peradilan. Sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang termasuk PPPK berjumlah 11 (sebelas) orang.

#### **A. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Rosidah, S.H., M.H.	Ketua
2	Dedy Kurniawan, S.H.	Wakil
3	Zarina, S.H.	Hakim
4	Aditya Permana Putra, S.H.	Hakim
5	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	Hakim
6	Hanif Fudin, S.H., M.H.	Hakim
7	Angela Ines Pamela, S.H.	Hakim
8	Rizki Cintia Devi, S.H.	Hakim
9	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	Hakim
10	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	Hakim
11	Alif Utama, S.H., M.H.	Hakim
12	Jar'an Kadir, S.H.	Panitera

No	Nama	Jabatan
13	Jonaidi M, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
14	Proklamasi P. M. Hambuako, S.H.	Panitera Muda Perkara
15	Krisnawati, S.H.	Panitera Pengganti
16	Jemmy Joieh Hattu, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
17	Karnali, S.H.	Panitera Pengganti
18	Riswan Laidi, S.H.	Panitera Pengganti
19	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
20	Ade Ariyo Yudanto, S.Kom.	Jurusita Pengganti
21	Nurul Hafiza, S.H.	Analis Perkara Peradilan
22	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Analis Perkara Peradilan
23	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Analis Perkara Peradilan
24	Abraham, S.H	Analis Perkara Peradilan
25	Moh. Rizal Fatoni, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
26	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.	Analis Dokumentasi Hukum
27	Cherryni Aulia Prastiwi, S.H.	Analis Dokumentasi Hukum

#### B. Profil Sumber Daya Manusia Non Teknis

No	Nama	Jabatan
1	Imelda Christine, S.E.	Sekretaris
2	Hj. Aminah, S.H.	Kasubbag PTIP

No	Nama	Jabatan
3	Galih Azizkhan, S.IP.	Plt.Kasubbag Kepegawaian & Ortala/ Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
4	Femianti, S.Kom.	Kasubbag Umum & Keuangan
5	Dian Puspita, S.H.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama

### C. Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sukarno	Operator layanan Operasional	Staf Kepegawaian
2	Frangky Atimang	Operator layanan Operasional	Staf PTIP
3	Samsul Bahri	Operator layanan Operasional	Staf Umum & Keuangan
4	Faldy Abraham, S.H.	Penata layanan Operasional	Staf Umum & Keuangan
5	Moh Fauzan, S.H.	Penata layanan Operasional	Admin Ecourt, SIPP
6	Ulil Amri Alimin, S.E.	Penata layanan Operasional	Staf Umum & Keuangan
7	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Penata layanan Operasional	Staf Panmud Hukum
8	Ade Chandra Permana, S.SI.	Penata layanan Operasional	Operator SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul GLP
9	Achmad Reyza	Operator layanan Operasional	Staf Panmud Hukum
10	Nur Ramadhan, S.H.	Penata layanan Operasional	Staf PTIP
11	Winda, S.E.	Penata layanan Operasional	Staf Kepegawaian

## D. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan 9 (sembilan) orang Hakim, 8 (delapan) orang pejabat teknis (Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perkara, Panitera Pengganti) dan 3 (tiga) orang Pejabat Struktural (Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan, 2 (orang) orang Pejabat Fungsional Analis (Analisis Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis SDM Ahli Pertama), 1 (satu) Orang Jurusita Pengganti, 2 (dua) orang Klerek Analis Perkara Peradilan, dan 5 (lima) orang CPNS. Jumlah PPPK sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari bagian Kepegawaian 2 (dua) orang, PTIP 2 (dua) orang, Umum dan Keuangan 4 (empat) orang, Kepaniteraan Muda Perkara 1 (satu) orang, Kepaniteraan Muda Hukum 2 (dua) orang.

## E. Mutasi

### 1. Mutasi Masuk

No	Nama	Instansi Asal	Keterangan
1.	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	PTUN Banjarmasin	18 Juni 2025
2.	Hanif Fudin, S.H., M.H.	PTUN Semarang	23 Juni 2025
3.	Navanya Gabriel Cuaca, S.H., M.H.	PTUN Surabaya	23 Juni 2025
4.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	PTUN Semarang	23 Juni 2025
5.	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	PTUN Palembang	23 Juni 2025
6.	Rizki Cintia Devi, S.H.	PTUN Banjarmasin	23 Juni 2025
7.	Angela Ines Pamela, S.H.	PTUN Surabaya	23 Juni 2025
8.	Dedy Kurniawan, S.H.	PTUN Bandung	29 Agustus 2025
9.	Krisnawati, S.H.	PTUN Banjarmasin	29 September 2025
10.	Jar'an Kadir, S.H.	PTUN Banjarmasin	8 Oktober 2025

### 2. Mutasi Keluar

No	Nama	Instansi Tujuan	Keterangan
1.	Burhan, S.H, M.H.	PT.TUN Makassar	8 Oktober 2025

## F. Promosi

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mendapat promosi jabatan pada tahun 2025.

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Imelda Christine, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris

## G. Rotasi

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mendapatkan rotasi jabatan pada tahun 2025

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
-	-	NIHIL	-

## H. Pensiun

No	Nama	Jabatan Lama	Keterangan
1.	Sitti Junaedah, S.E.	Sekretaris	1 Agustus 2025

## I. Kegiatan yang dilaksanakan/diikuti oleh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama tahun 2025, sebagai berikut:

1. Penandatanganan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025.
2. Sosialisasi Persiapan Gaji Terpusat pada tanggal 7 Januari 2025, diikuti oleh Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Bendahara Penerima.
3. Rapat Komite Anggaran pada tanggal 8 Januari 2025, diikuti oleh Sekretaris, Panitera, Panmud Perkara dan Panmud Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag PTIP serta Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama.

4. HUT Peraturan yang Ke-34 pada tanggal 14 Januari 2025, diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
5. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Persediaan Barang Milik Negara (BIMA) Semester (II) Tahun 2024 sesuai Surat Nomor 19/BNA.4/LP1.2.4/1/2025 tanggal 13 Januari 2025, pada 14 Januari 2025 diikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
6. Penandatanganan Kerjasama Pos Bantuan Hukum dengan Perkumpulan Cahaya Celebes Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 15 Januari 2025, dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
7. Bimbingan Teknis Implementasi oleh BRI yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Nomor UUSD-3/KPU.270/2025 tanggal 13 Januari 2025, pada tanggal 16 sampai dengan 17 Januari 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan dan Pengelola Keuangan.
8. Rapat Koordinasi Aplikasi E-LAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Surat Nomor 68.3/III.1.2/1/2025 tanggal 15 Januari 2025, pada tanggal 17 Januari 2025 diikuti oleh Ade Ariyo Yudanto, S.Kom. secara *zoom meeting*
9. Bimtek Sedap Bimbingan Teknis Seputar Mutasi dan Pelaporan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Nomor 3/WPB.27/2025 tanggal 17 Januari 2025, pada tanggal 21 Januari 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
10. Sosialisasi Bimbingan Teknis Asesor Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 63/DJNT/DL1/1/2025 tanggal 14 Januari 2025, pada tanggal 20 s/d 22 Januari 2025 diikuti oleh Wakil Ketua, Zarina, S.H., Annisa Yanuartanti, S.H., M.H., Aditya Permana Putra, S.H., dan Ade Ariyo Yudanto, S.Kom. secara *zoom meeting*.

11. Sosialisasi Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI T.A 2024 yang dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sesuai Surat Nomor 30/SEK/KU 2.L/1/2025 tanggal 8 Januari 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
12. Sosialisasi Pembaharuan Aplikasi SIPP tingkat pertama versi 5.6.5 dan Aplikasi e-BERPADU 4.0.0, dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sesuai Surat Nomor 14/BUA.6/DL.1.10/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, pada tanggal 23 Januari 2025, diikuti oleh para Hakim, Panitera, Panmud Hukum, Panitera Pengganti dan Ariyo Yudanto, S.Kom. secara *zoom meeting*.
13. Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Nomor 301/KPTTUN.W4/DL.1.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, pada tanggal 15 Januari sampai dengan Mei 2025, diikuti oleh para Hakim melalui *zoom meeting*.
14. Konsolidasi Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Palu sesuai Surat Nomor 16/SEK.PTA.W19-A/KU1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, pada tanggal 22 sampai 24 Januari 2025 diikuti oleh Ade Chandra Permana, S.Si. dan Fachri Darmawan, S.H secara luring di Pengadilan Tinggi Agama Palu.
15. Sosialisasi Integrasi Laporan Satuan Kerja PT.TUN Makassar terkait pelaporan bulanan, triwulan, caturwulan, semester, dan tahunan sesuai Surat Nomor 308/PAN.PT.TUN.W4.TUN/HK.1.2/Hk.1.2/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, dilaksanakan oleh PT.TUN Makassar melalui *zoom meeting* diikuti oleh Proklamasi P.M.P, S.H., Jonaedi M, S.H., M.H., Ade Aryo Yudanto, S.Kom., Nurul Hafiza, S.H. Annisa Mila Zakiya, S.H., dan Moh. Fauzan, S.H.
16. Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi sesuai Surat Nomor 146/BUA.3/KU2.2/1/2025 tanggal 17 Januari 2025, pada tanggal 4 Februari 2025

secara *zoom meeting*, diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan.

17. Pembinaan Dirjen Badilmiltun secara daring sesuai Surat Nomor 124/DJMT/UND.KP3.4.3/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, pada tanggal 5 Februari 2025, diikuti oleh Wakil Ketua, para Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara *zoom meeting*.
18. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Nomor 147/DJMT.3/DL.1.10/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, dilaksanakan oleh Dirjen Badilmiltun pada tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2025, diikuti oleh Ade Aryo Yudanto, S.Kom. melalui *zoom meeting*.
19. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI dan Rapat Koordinasi Teknis Pimpinan dan Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara Se-Indonesia Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 166/DJMT/B/DL.1.10/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2025 dan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2025, yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara *zoom meeting*.
20. Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah sesuai Surat Nomor 46/BUA.1/UND/RA1.8/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, pada tanggal 13 Februari 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Bendahara secara *zoom meeting*.
21. Tasyakuran Menyambut Bulan Suci Ramadan pada tanggal 28 Februari 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
22. Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tanggal 3 Maret 2025, diikuti oleh seluruh Pegawai PTUN Palu.

23. Bimbingan System Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Surat Nomor S-300/WPB tanggal 27 Februari 2025, pada tanggal 4 Maret 2025, diikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan, Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting* pada tanggal 5, 12, 19, 26 Maret 2025.
24. Anjangsana ke Kegawai PTUN Palu yang purnabakti a.n. Hendrik Lumabiang, S.H. dan Mahmud, B.A. pada tanggal 10 Maret 2025, oleh Hj. Sitti Junaedah, S.E., Hj. Aminah, S.H. dan Imelda Christine, S.E.
25. Asistensi Digitalisasi Pembayaran pada Aplikasi *Digital Paymen* (digipay satu) versi 2.0 sesuai Surat Nomor UND-10/KPN.270/2025 tanggal 10 Maret 2025, pada tanggal 12 Maret 2025, diikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan.
26. Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI perihal Tindak Lanjut Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 73/BUN.1/UND/RA.1.8/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 pada tanggal 12 Maret 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag PTIP.
27. Buka Puasa bersama seluruh Pegawai PTUN Palu pada tanggal 19 Maret 2025, bertempat di Gedung Serbaguna PTUN Palu.
28. Tindak Lanjut Asset BMN yang rusak pada tanggal 19 Maret 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting*.
29. Kegiatan dengan Topik Update Kebijakan Akuntansi Untuk Pelaporan Keuangan tanggal 13 Maret 2025, diikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan.
30. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Dinas Tanpa Melalui Lelang dan Refreshment, Aplikasi SIMAN terkait Updating data BMN berupa tanah pada SIMAN dalam rangka Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) di wilayah kerja KPKNL Palu sesuai Surat Nomor UMD-49/WKN.16/2025 tanggal 17 Maret 2025, pada tanggal 20 Maret 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Ade Chandra Permana, S.Si.
31. Sosialisasi Aplikasi e-Monev Bappenas 2025 sesuai Surat Nomor 108/BUA.1/UMD/RA1.5/IV/2025 tanggal 28 April 2025, sehubungan

dengan masa pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, pada tanggal 8 Mei 2025, diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting*.

32. Rapat dalam rangka Optimalisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Dirjen Badilmiltun dan Peradilan di bawahnya sesuai Surat Nomor 348/DjMT/UND.OT1.2/IV/2025 tanggal 9 April 2025, pada tanggal 10 April 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai PTUN Palu secara *zoom meeting*.
33. Halal Bi Halal pada tanggal 16 April 2025 diikuti Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
34. Seminar Internasional HUT IKAHU Ke-72 secara Hybrid pada tanggal 21 April 2025 secara *zoom meeting*, diikuti oleh Wakil Ketua, dan Hakim PTUN Palu.
35. Sosialisasi Peningkatan Fungsi Aplikasi E-Sadewa versi 3.7 dan Perubahan Role User pada SIMAN V2 secara daring sesuai Surat Nomor 140/BUA.4/UND.PL1.2/IV/2025 tanggal 24 April 2025, diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting*.
36. Pemeriksaan mata gratis dari Smec Klinik Spesialis Mata Palu sesuai Surat Nomor 146/KPTUN.W4-TUN2/RT1/IV/2025 tanggal 23 April 2025, pada tanggal 25 April 2025 di Kantor PTUN Palu diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
37. Sosialisasi Aplikasi elektronik pelaporan (*e-lap*) Versi 2.0 sesuai Surat Nomor 148/KPTUN.W4-TUN2/ST.KP.7.1/IV/2025 tanggal 25 April 2025, yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diikuti oleh Panitera Muda Perkara secara *zoom meeting*.
38. Koordinasi Teknis Bidang Sekretariatan dan Kepaniteraan sesuai Surat Nomor 652/KPTTUN.W4/ST.KP7.1/IV/2025 tanggal 28 April 2025, yang

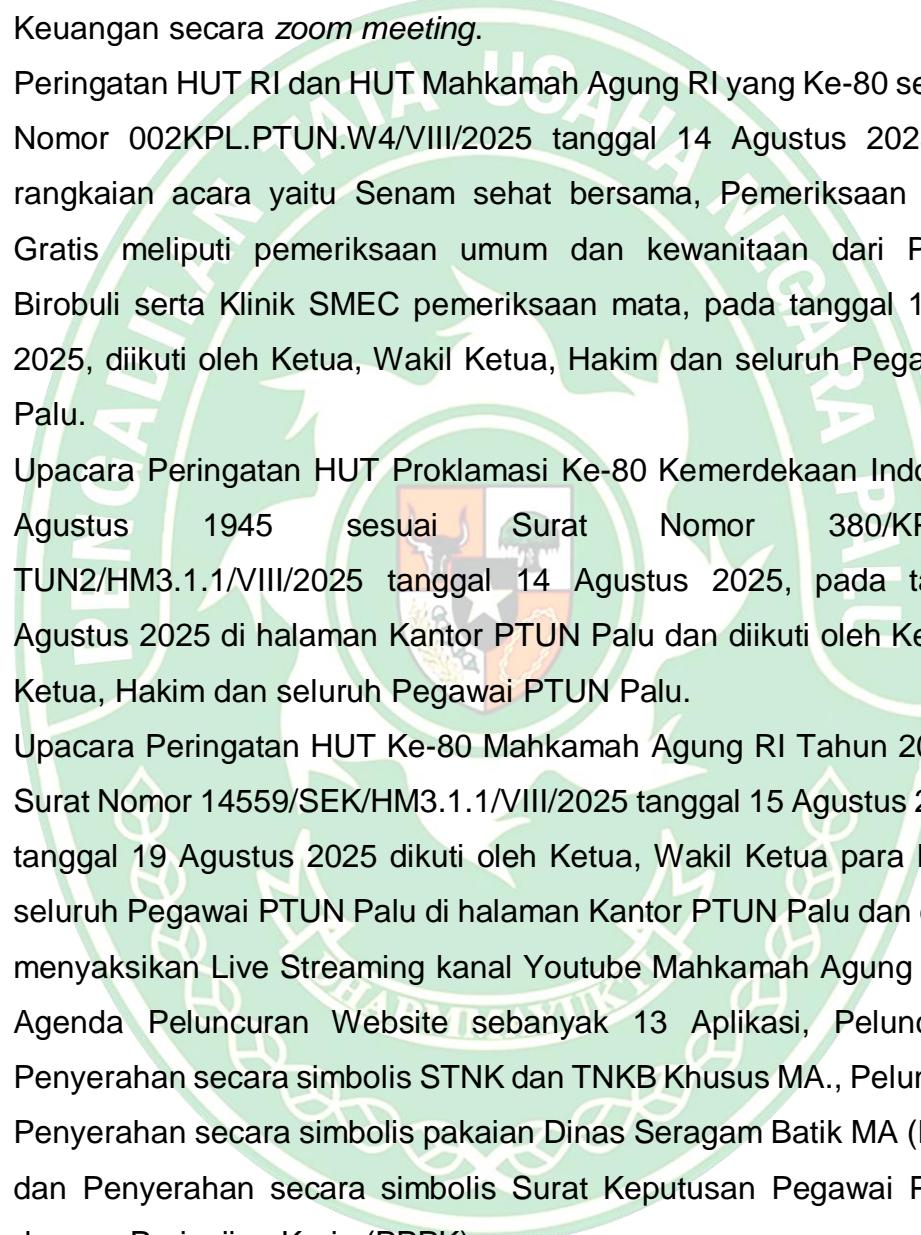
dilaksanakan oleh H. Iswan Herwin, S.H., M.H. (KPT.TUN Makassar), Keli Margono, S.H. Sekretaris, dan Miskini, S.H., M.H. Panitera PT.TUN Makassar, pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, dan seluruh Pegawai PTUN Palu.

39. Pembinaan Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Nomor 168/KPTUN.W4-TUN2/UND.KP3.4.2/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, pada tanggal 7 Mei 2025 diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu secara daring.
40. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil a.n. Nurul Hafiza, S.H. dan Annisa Mila Zakiya, S.H. sesuai Surat Nomor 175/KPTUN.W4-TUN2/KP.4.1.3/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, pada tanggal 14 Mei 2025 yang dihadiri oleh Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
41. Pembinaan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 517/DJMT/UND.HM1/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, diikuti oleh Ketua dan Sekretaris di Grand Orchardz Hotel Kemayoran Jakarta Pusat.
42. Kegiatan Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I dan Strategi Optimalisasi Capaian IKPA Tahun 2025 di satuan kerja lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN sesuai Surat Nomor 5 11/DJMT.1/KU1.1.4/V/2025 tanggal 5 Mei 2025, pada tanggal 20 sampai dengan 21 Mei 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan secara daring.
43. Sosialisasi Petugas Teknis Perubahan Kode Fikasi BMN sesuai Surat Nomor 206/BUA.4/UMD.PL1.2.5/V/2025 tanggal 20 Mei, pada tanggal 26 Mei 2025 secara *zoom meeting* dihadiri oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Ade Chandra Permana, S. Si.
44. Ibadah Krisma Mahkamah Agung RI sesuai Surat Nomor 37/krisma/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, pada tanggal 23 Mei 2025 secara daring diikuti oleh Proklamasi Putra Moses Hambuako, S.H., Imelda Christine, S.E., Jemy Joey Hattu, S.H, M.H., Frangki A. Timang, dan Faldy Abraham, S.H.

45. Pembinaan Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Nomor 580/DJMT/UMD.KP3 4.3/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025, pada tanggal 5 Juni 2025 secara daring diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
46. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup sesuai Surat Nomor 614/DJMT/DL1.10/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2025 yang diikuti oleh Aditya Permana Putra, S.H. dan Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.
47. Pelatihan Manajemen Risiko sesuai Surat Tugas Nomor 82/BSDK.4/DL1.6/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025, pada tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2025 secara online diikuti oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H. dan Burhan, S.H., M.H.
48. Pelantikan Hakim a.n. I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H. pada tanggal 18 Juni 2025 oleh Ketua dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim, dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
49. Pelantikan Hakim atas nama Hanif Fudin, S.H., Alif Wili Utama, S.H., Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., Navanya Gabriel Cuaca, S.H., Rizki Cintia Devi, S.H., dan Angela Ines Pamela, S.H, pada tanggal 23 Juni 2025 oleh Ketua dan dihadiri oleh Wakil, Hakim serta seluruh Pegawai PTUN Palu.
50. Konsolidasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung R.I Semester I Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 799 /BUA.3/KU2.2/6/2025 tanggal 16 Juni 2025, pada tanggal 8 Juli 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
51. Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Professor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung Bapak Prof.Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. pada tanggal 7 Juli 2025, di Semarang dihadiri oleh Hanif Fudin, S.H., M.H.
52. Rapat Monitoring Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 295/DJMT.3/B/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025, pada tanggal 21 Juli 2025 diikuti oleh Panitera Muda Perkara dan Admin IT secara *zoom meeting* melalui aplikasi Monekstun Tahun 2025.
53. Sosialisasi tentang Peluang Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, sesuai

Surat Nomor 297/BUA.4/UND.P11.2/VII/2025, pada tanggal 21 Juli 2025 diikuti oleh Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu secara *zoom meeting*.

54. Pelatihan Juru Bicara dan Pegelolaan Media Sosial pada 4 lingkungan peradilan sesuai Surat Nomor 145 /BUA.6/UND.HM2-1/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025, pada tanggal 29 Juli 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim secara *zoom meeting*.
55. Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Tahun 2026 pada tanggal 31 Juli 2025, diikuti oleh Kasubag PTIP dan Nur Ramadhan, S.H. secara *zoom meeting*.
56. Pembinaan Dirjen Badilmiltun secara daring sesuai Surat Nomor 348/KPTUN.W4-TUN2/UND.KP3.4.2/VII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, pada tanggal 4 Agustus 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
57. Peresmian Penggunaan Ruang Sekretariat Pengurus PTWP Pusat sesuai Surat Nomor 69/PP.PTWP/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 secara virtual, diikuti oleh Aditya Permana Putra, S.H. sebagai Ketua PTWP Cabang PTUN Palu.
58. Pembinaan dalam rangka Meningkatkan Pemahaman dan Profesionalisme Aparatur Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk memperkuat Integritas dan Kualitas Pelayanan Peradilan sesuai Surat Nomor 550/KPTUN.W1-TUN4/UND.OT1.2/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, pada tanggal 8 Agustus 2025 secara *zoom meeting* diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Kepaniteraan beserta para jajarannya.
59. Pembinaan Meningkatkan Pemahaman dan Profesionalisme Aparatur Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara serta sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk memperkuat Integritas dan Kualitas Pelayanan sesuai Surat Nomor 993/K.PTUN.W7.TUN3/UND.OT1.2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, pada tanggal 14 Agustus 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Kepaniteraan serta jajarannya secara *zoom meeting*.

- 
60. Sosialisasi dalam rangka Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari nilai perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran Dipa 005.05 di Lingkungan Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Nomor 908/DJMT/KU1.1.4/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, pada tanggal 20 Agustus 2025, diikuti oleh Kasubag PTIP dan Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
  61. Peringatan HUT RI dan HUT Mahkamah Agung RI yang Ke-80 sesuai Surat Nomor 002KPL.PTUN.W4/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025, dengan rangkaian acara yaitu Senam sehat bersama, Pemeriksaan kesehatan Gratis meliputi pemeriksaan umum dan kewanitaan dari Puskesmas Birobuli serta Klinik SMEC pemeriksaan mata, pada tanggal 15 Agustus 2025, diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
  62. Upacara Peringatan HUT Proklamasi Ke-80 Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sesuai Surat Nomor 380/KPTUN.104-TUN2/HM3.1.1/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025, pada tanggal 17 Agustus 2025 di halaman Kantor PTUN Palu dan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
  63. Upacara Peringatan HUT Ke-80 Mahkamah Agung RI Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 14559/SEK/HM3.1.1/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, pada tanggal 19 Agustus 2025 dikuti oleh Ketua, Wakil Ketua para Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu di halaman Kantor PTUN Palu dan dilanjutkan menyaksikan Live Streaming kanal Youtube Mahkamah Agung RI dengan Agenda Peluncuran Website sebanyak 13 Aplikasi, Peluncuran dan Penyerahan secara simbolis STNK dan TNKB Khusus MA., Peluncuran dan Penyerahan secara simbolis pakaian Dinas Seragam Batik MA (PDSBMA), dan Penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  64. Diskusi Pembahasan Permasalahan Hukum se-Wilayah Hukum PT.TUN Makassar Tahun 2025, pada tanggal 20 Agustus 2025 diikuti oleh Ketua dan Hakim secara *zoom meeting*.

65. Rapat Peningkatan dan Pelayanan Peradilan sesuai Surat Nomor 385/KPTUN.WY.TUN2/UND.OT1/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 pada tanggal 21 Agustus 2025 diikuti oleh Ketua, Hakim, Panitera, Plt. Sekretaris secara daring.
66. Sosialisasi sehubungan dengan surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sesuai Surat Nomor 1234/BUA.3/UND.KU1.1/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, pada tanggal 26 Agustus 2025 yang diikuti seluruh PPPK secara *zoom meeting*.
67. Pembinaan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dalam rangka Meningkatkan Pemahaman dan Profesionalisme Aparatur Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta sebagai bagian dan upaya Mahkamah Agung RI untuk memperkuat Integritas dan Kualitas Pelayanan Peradilan sesuai Surat Nomor 646/KPT.TUN.WI-TUN/UND.HM3.1.1/VIII/ 2025 tanggal 25 Agustus 2025, pada tanggal 29 Agustus 2025 secara *zoom meeting*, diikuti oleh Ketua, Wakil, Hakim, dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
68. Acara Pelantikan Bapak Dedy Kurniawan, S.H. sebagai Wakil Ketua PTUN Palu pada tanggal 29 Agustus 2025 oleh Ketua dan dihadiri oleh Hakim, Anggota DYK dan undangan serta seluruh Pegawai PTUN Palu.
69. Pembinaan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sesuai Surat Nomor 646/KPTTUN.WI-TUN/UND.HM3.1.1/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, pada tanggal 29 Agustus 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu secara *zoom meeting*.
70. Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Pejabat Negara dan PPPK Tahun Anggaran 2025. Sesuai Surat Nomor 1267/BUA.3.02/UND.KU1/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, pada tanggal 29 Agustus 2025 dikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag PTIP, Kasubag Ortala, Dian Puspita, S.H. dan Nur Ramadhan, A.Md., S.H. secara *zoom meeting*.
71. Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 993/DJMT/UND.KP3.4.3/VIII/2025

tanggal 29 Agustus 2025, pada tanggal 2 September 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai secara *zoom meeting*.

72. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 1 September 2025 oleh Ketua dan dihadiri Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata usaha Negara Palu dan Keluarga dari PPPK.
73. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMPAN terintegrasi sesuai Surat Nomor 1048/DJMT/UND/HM1.1.1/IX/2025 tanggal 11 September 2025, pada tanggal 12 September 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu secara *zoom meeting*.
74. Rapat Koordinasi Persiapan dan Penyempurnaan Penyusunan RKA-KL Pagu Alokasi T.A 2026 sesuai Surat Nomor 286/BUA.1/UND.RA1.7/IX/2025 tanggal 23 September 2025, pada tanggal 24 September 2025 dihadiri oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Nur Ramadhan, S.H. secara virtual.
75. Monitoring Evaluasi Pelaporan Data Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Nomor 283/BUA.1/UND/OT1.6/IX/2025 tanggal 23 September 2025, pada tanggal 25 s/d 26 September 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Nur Ramadhan, S.H. dan secara *zoom meeting*.
76. Acara perpisahan Bapak Burhan, S.H., M.H. yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai dan anggota Dharmayukti Karini.
77. Pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun secara daring sesuai Surat Nomor 1127/DJMT/UND.KP3.4.3/IX/2025 tanggal 30 September 2025, pada tanggal 2 Oktober 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
78. Kuliah Umum dan Dialoq Yudisial tentang Keadilan Iklim dan Litigasi Lingkungan Tantangan Bagi Peradilan sesuai Surat Nomor 1090/BSDK/DL1.6/IX/2025 tanggal 29 September 2025, pada tanggal 2 Oktober 2025 secara *zoom meeting*, diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim.
79. Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2025 Satuan Kerja Lingkup KPPN Palu sesuai Surat Nomor UND-28/KPN.2701/2025 tanggal

6 Oktober 2025, pada tanggal 7 Oktober 2025 diikuti oleh Ade Chandra Permana, S.Si. di KPPN Palu.

80. Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Triwulan III Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 10/BUA/KU2.1/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, pada tanggal 9 Oktober 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, Nur Ramadhan, S.H..
81. Persiapan Revisi DJA agenda pembahasan: Membahas dan mengimput SAKTI buka blokir 524 dan akun lain, Penarikan pagu buka blokir untuk dialihkan ke belanja gaji, Pengimputan belanja gaji minus, ABT sewa rumah dinas Hakim, Penarikan Gaji PPNPN, ABT belanja operasional, pada tanggal 9 Oktober 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP dan Nur Ramadhan, S.H secara *zoom meeting*.
82. Rapat Koordinasi Teknis sesuai Surat Nomor 1178/DJMT/UND.HM.3.1.1/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025, pada tanggal 4 s/d 6 November 2025 diikuti Ketua dan Sekretaris di Hotel Grand Travello Jalan Gren Kota Bintang Jakasampurna Bekasi Jawa Barat.
83. Sosialisasi Fitur Standarisasi dan Evaluasi Pengadaan Menu, Pengadaan Barang pada Aplikasi e-Sadewa sesuai Surat Nomor 581/BUA.4/UND.PL1.2/X/2025 tanggal 13 OKtober 2025, pada tanggal 16 Oktober 2026 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan serta Ade Chandra Permana, S.Si.
84. Seminar Nasional Program Pertukaran Pengetahuan YSEALI dengan topik *“Sexual Harassment at Workplace 101 dan How American courts Handle Hassment and Bullying in the workplace”* sesuai Surat Nomor 1201/DJMT/DL1.10/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025, pada tanggal 17 Oktober 2025 secara *zoom meeting*, diikuti oleh Ketua dan Hakim.
85. Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 1215/DJMT.3/DL1.1.0/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, pada tanggal 4 s/d 6 Nopember 2025 diikuti oleh Hakim secara *zoom meeting*.
86. Penyelenggaraan Overview Batch IX dan X Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 sesuai Surat

Nomor 1213/BSDK/DL1.6/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, pada tanggal 24 Oktober 2025 diikuti oleh PPPK Golongan V atau SMA sederajat.

87. Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial sesuai Surat Nomor WKMA. Y/UND.HM3.1.2/X/ 2025 tanggal 22 Oktober 2025, pada tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan 1 November 2025 dikuti oleh Panitera di Novotel Manggadua.
88. Sosialisasi Persiapan Revisi Dit.PA dalam rangka Persiapan Revisi Akhir Dit.PA Kementerian Keuangan, terkait perhitungan gaji dan pengimputan di SAKTI mulai tanggal 27 oktober 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP dan Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
89. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2025 dengan tema “Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu” diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
90. Upacara Peringatan Hari Pahlawan dengan tema “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” pada tanggal 10 November 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim serta seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
91. Kegiatan Penugasan Hakim sebagai Responden Dalam Survei Integritas Hakim Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 1345/DJMT/PW1.4/X1/2025 tanggal 11 November 2025.
92. Pembinaan Teknis Yudisial sesuai Surat Nomor 2893/DJA/KP3.4.2/X/2025 tanggal 10 November 2025, pada tanggal 19 November 2025 diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim secara *zoom meeting*.
93. Kegiatan Asset Talk Dalam Rangka Hari Kekayaan Negara Ke-19 Tahun 2025 sesuai Surat Nomor UND-161/ WKN.16/2025 tanggal 14 November 2025, pada tanggal 19 sampai 21 November 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
94. Sosialisasi Reguler Kepegawaian Tenaga Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 1417/DJMT/KP2.1.1/XI/2025 tanggal 20 November 2025, diikuti oleh Sekretaris dan Plh. Kasubag Kepegawaian dan Ortala secara *zoom meeting*.

95. Bimbingan Teknis Manajemen PPPK sesuai Surat Nomor 4223/BUA.2/UND/KP/XI/2025 tanggal 26 November 2025, pada tanggal 27 November 2025 diikuti oleh Plh. Kasubag Kepegawaian dan Ortala secara *zoom meeting*.
96. Persiapan Rapat Koordinasi Sekretaris seluruh Indonesia sesuai Surat Nomor 1897/BUA.3/UND.KU.1.1/XI/2025 tanggal 26 November 2025, pada tanggal 27 November 2025 diikuti oleh Sekretaris secara *zoom meeting*.
97. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional sesuai Surat Nomor 4227/BUA.2/UND.KP3.4.3/XI/2025 tanggal 26 November 2025, pada tanggal 27 November 2025 diikuti oleh Dian Puspita, S.H. secara *zoom meeting*.
98. Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Data Tanah dan Bangunan yang Berdiri di Atasnya sesuai Surat Nomor 678/BUA.4/UND.PL1.2/XI/2025 tanggal 24 November 2025, pada tanggal 27 November 2025 diikuti oleh Kasubag Umum dan keuangan secara *zoom meeting*.
99. Pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Nomor 665/KPTUN.W4-TUN 2/UND.KP3.4/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025, pada tanggal 1 Desember 2025 secara *zoom meeting* diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Palu.
100. Pembinaan Administrasi sesuai Surat Nomor 220/WKMA.N4/UND.HM3.1.2/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025, pada tanggal 11 Desember sampai dengan 13 Desember 2025 diikuti oleh Sekretaris secara daring.
101. Sosialisasi SAKIP sesuai Surat Nomor 1520/DJMT/UND.OT1.6/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025, pada tanggal 5 Desember 2025 diikuti oleh Ketua, Zarina, S.H., Sekretaris, Panitera, Kasubag PTIP, Panmud Hukum, Plt. Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Nur Ramadhan, S.H. dan Nurul Hafizah, S.H. secara *zoom meeting*.
102. Sosialisasi dalam rangka Penyelesaian Pagu Minus 2025 dan Persiapan Revisi 2026 pada tanggal 9 Desember 2025, diikuti oleh Sekretaris,

- Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, Nur Ramadhan, S.H. secara *zoom meeting*.
103. Sosialisasi dalam rangka Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 005.05 di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai Surat Nomor 1548/DJMT/KU1.1.4/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025, pada tanggal 11 Desember 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kasubag PTIP dan Kasubag Umum dan Keuangan secara *zoom meeting*.
  104. Profiling ASN (Pro ASN) dalam rangka Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN sesuai Surat Nomor 16415/SEK/KP3.1.2/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, pada tanggal 20 Desember 2025 diikuti oleh Femianti, S.Kom., Galih Azizkhan, S.I.P., Dian Puspita, S.H., Annisa Mila Zakiya, S.H., Nurul Hafiza, S.H., Abraham, S.H., A. Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H., dan Moh. Rizal Fatoni, S.T.
  105. Sosialisasi dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Para Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai Surat Nomor 380/SE/UND.KP/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, pada tanggal 16 Desember 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP dan Galih Azizkhan, S.I.P melalui *zoom meeting*.
  106. Sosialisasi Fitur E-SAKIP pada Aplikasi BATARA sesuai Surat Nomor 379/SEK/UND.OT1.6/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, pada 17 Desember sampai dengan 18 Desember 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, Nur Ramadhan, S.H., Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting*.
  107. Rapat Koordinasi sesuai Surat Nomor 365/BUA.1/UND/RA1.8/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, pada tanggal 15 Desember 2025 diikuti oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, Dian Puspita, S.H, Nur Ramadhan, S.H., Moh. Rizal Fatoni, S.T dan Ade Chandra Permana, S.Si. secara *zoom meeting*.
  108. Mengikuti undangan Apresiasi dan Refleksi akhir tahun MA RI Tahun 2025 sesuai Surat Nomor 724/WKPTUN.W4-TUN2/UND.Kp3.1/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan akan dilaksanakan pada tanggal, 30 Desember

- 2025 yang diikuti oleh Wakil, para Hakim dan seluruh pegawai dan PPPK secara Zoom meeting.
109. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 sesuai Surat Nomor 745/BUA.4/PL1.2.1/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, pelaksanaannya pada tanggal 31 Desember 2025 diikuti oleh Sekretaris dan Ade Chandra Permana, S.Si.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga mengikuti pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan diskusi-diskusi masalah hukum dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas tenaga teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.



## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. Pengelolaan Keuangan**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2025 telah mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan Dana yang telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.325.025.000 DIPA 005.05 sebesar Rp123.205.000. Realisasi Anggaran belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai  
Alokasi Anggaran belanja gaji dan tunjangan Rp5.082.820.000 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.062.554.567, Sisa Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.265.433.
  - b. Belanja Barang  
Alokasi Dana Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.122.205.000. Realisasi Anggaran belanja barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.121.376.393. Sisa Anggaran belanja barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah Rp828.607.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun Anggaran 2025 juga telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Modal sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.000.000. Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp119.659.999. Sisa Anggaran Belanja Modal sampai tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp340.001.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun Anggaran 2025 juga telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara belanja barang DIPA Nomor 005.05.2.578851 dengan Anggaran sebesar Rp123.205.000. Realisasi belanja barang dan jasa pelayaan hukum sebesar Rp111.995.500.00, Sisa belanja barang dan jasa pelayaan hukum sebesar Rp11.209.500.

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah dibangun sesuai prototype Empat Lingkungan Peradilan yang dimulai pada bulan September 2022 dan selesai pada akhir bulan November 2023.

Luas Tanah Gedung 3.250 m<sup>2</sup>, Luas Gedung 2.282 m<sup>2</sup>, halaman Gedung 1.518 m<sup>2</sup> dan pagar 212 m<sup>2</sup> dilengkapi dengan ruangan sebagai berikut:

### a) Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua/Ruang Istirahat/Toilet	1	Baik
2	Ruang Wakil/Ruang Istirahat/Toilet	1	Baik
3	Ruang Hakim	7	Baik
4	Ruang Panitera/Toilet	1	Baik
5	Ruang Sekretaris/Toilet	1	Baik
6	Ruang Sidang Utama	2	Baik
7	Ruang Sidang Pemeriksaan Persiapan	1	Baik
8	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
9	Ruang Staf Panmud Hukum	1	Baik
10	Ruang Panmud Perkara	1	Baik
11	Ruang Staf Perkara	1	Baik
12	Ruang Arsip Perkara Lt.1	3	Baik
13	Ruang Kasubbag Umum & Keuangan	1	Baik
14	Ruang Staf Umum & Keuangan	1	Baik
15	Ruang Bendahara	1	Baik
16	Ruang Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	1	Baik

17	Ruang Staf Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	1	Baik
18	Ruang Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Baik
19	Ruang Staf Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Baik
20	Ruang Server/IT	1	Baik
21	Ruang Perpustakaan	1	Baik
22	Ruang Arsip Keskretariatan	1	Baik
23	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	Baik
24	Ruang Serbaguna	1	Baik
25	Ruang Kontrol	1	Baik
26	Ruang Alat	1	Baik
27	Ruang Gudang Lt.1	1	Baik
28	Ruang Gudang Lt.2	1	Baik
29	Ruang Tunggu Sidang	1	Baik
30	Ruang Tunggu Pelayanan	1	Baik
31	Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
32	Ruang Tamu Tertutup	1	Baik
33	Ruang Posbakum	1	Baik
34	Toilet Wanita/Toilet Pria (Pengunjung)	2	Baik
35	Toilet Disabilitas	1	Baik
36	Toilet Pegawai Pria/Wanita	2	Baik
37	Ruang Menyusui/Ruang Bermain Anak	1	Baik
38	Ruang Kesehatan	1	Baik
39	Ruang Panel Lt.1	1	Baik
40	Ruang PTSP	1	Baik
41	Ruang Musyawarah Hakim	1	Baik
42	Ruang Rapat Ketua	1	Baik
43	Ruang Pantry Lt.2	1	Baik
44	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
45	Ruang Media Center	1	Baik

46	Ruang Panel Lt.2	1	Baik
47	Ruang Mushola Lt.2	1	Baik
48	Tempat Wudhu Lt.2 Pria/Wanita	2	Baik
49	Toilet Hakim Pria/Wanita	2	Baik
50	Ruang Jurusita Pengganti	1	Baik

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah Seluruhnya	Jumlah yang Rusak	Keterangan
1	Lemari Kayu	34	-	Baik
2	Rak Besi	13	-	Baik
3	Filing Cabinet Besi	15	-	Baik
4	Brankas	4	-	Baik
5	CCTV Camera	39	-	Baik
6	Mesin Absensi	2	-	Baik
7	Focusing Screen/Layar Led Projector	1	-	Baik
8	Meja Kerja Kayu	105	-	Baik
9	Kursi Besi Metal	154	-	Baik
10	Kursi Kayu	15	-	Baik
11	Sice	17	-	Baik
12	Meja Komputer	7	-	Baik
13	Meja Resepsionis	3	-	Baik
14	Meubelair lainnya	-	-	-
15	Mesin Pemotong Rumput	1	-	Baik
16	AC Split	6	-	Baik
17	Televisi	21	-	Baik
18	Power Amplifier	3	-	Baik
19	Equalizer	3	-	Baik
20	Loudspeaker	29	-	Baik
21	Sound System	1	-	Baik
22	Wireless	2	-	Baik

23	Mic Conference	1	-	Baik
24	Unit Power Supply	9	-	Baik
31	Camera Video	1	-	Baik
32	Lambang Garuda Pancasila	1	-	Baik
33	Tiang Bendera	4	-	Baik
34	Tangga Aluminium	1	-	Baik
35	Kaca Hias	4	-	Baik
36	Lambang Instansi	1	-	Baik
37	Audio Mixing Console	2	-	Baik
38	Audio Mixing Portable	1	-	Baik
39	Uninteruptible Power Supply (UPS)	9	-	Baik
40	Power Amplifier	3	-	Baik
41	Peralatan Studio Audio	1	-	Baik
42	Rak Peralatan	9	-	Baik
43	Camera Digital	1	-	Baik
44	Telephone (pabx)	1	-	Baik
45	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	-	Baik
46	Pesawat Telephone	24	-	Baik
47	Genset	1	-	Baik
48	Internet	1	-	Baik
49	Komputer jaringan lainnya	1	-	Baik
50	P.C Unit	28	-	Baik
51	Laptop	34	-	Baik
52	Note Book	9	-	Baik
53	Printer (peralatan Personal komputer)	26	-	Baik
54	Server	2	-	Baik
55	Router	2	-	Baik

56	Hub	-	-	-
57	Rak Server	5	-	Baik
58	Wireless Acess Point	10	-	Baik
59	Mobile Modem Gsm/C	-	-	-
60	Peralatan Komputer Lainnya	1	-	Baik
61	Scanner (Peralatan Komputer lainnya)	4	-	Baik
62	Monograf	2	-	Baik
63	Alat Musik Keyboard	1	-	Baik
64	Bracket standing Peralatan	3	-	Baik
65	Mesin Antrian	1	-	Baik
66	Mixer Sound System	4	-	Baik
67	Micropone Stand / Bom	5	-	Baik
68	Alat Studio lainnya	6	-	Baik
69	Switch Lan Alied	7	-	Baik
70	Alat Pemadam Kebakaran	42	-	Baik
71	Fire Alarm System	2	-	Baik
72	Bangunan Gedung Ibadah	1	-	Baik
73	Pos Jaga	1	-	Baik
74	Air Curtain	4	-	Baik
75	Kanopi	2	-	Baik
76	Bangunan Rumah Genset	1	-	Baik
77	Pagar Permanen	1	-	Baik
78	Mesin Penghisap Debu	2	-	Baik
79	AC Central	55	-	Baik
80	Michrophone	10	-	Baik
81	Michrophone Boom Stand	5	-	Baik
82	Paging Mic	1	-	Baik
83	Rak Peralatan	9	-	Baik
84	Video Wall	1	-	Baik

**b) Kendaraan Dinas****Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jenis Kendaraan	Kondisi
1	Station Wagon (Innova Reborn)	2024	Roda 4	Baik
2	Sedan (Vios)	2007	Roda 4	Rusak ringan
3	Minibus (Toyota Kijang KF80)	2000	Roda 4	Rusak ringan
4	GL-Pro	2006	Roda 2	Rusak ringan
5	Supra	2006	Roda 2	Rusak ringan
6	Supra	2007	Roda 2	Baik
7	Supra	2008	Roda 2	Baik
8	Revo	2009	Roda 2	Baik
9	Revo	2009	Roda 2	Baik
10	Revo	2009	Roda 2	Baik

**c) Rumah Dinas**

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi
1	Rumah Dinas Ketua	1	Rusak Ringan
2	Rumah Dinas Wakil	1	Rusak Ringan
3	Rumah Dinas Hakim	4	Rusak Ringan
4	Rumah Dinas Panitera	1	Rusak Ringan
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	Rusak Ringan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini telah menempati gedung baru namun demikian masih sangat membutuhkan sarana perlengkapan dan fasilitas perkantoran seperti pengadaan meubelair yang baru dikarenakan meubelair yang lama sudah banyak yang rusak akibat perpindahan kantor dan kondisi barang sudah tua.

## C. Pengelolaan Teknologi Informasi

### ➤ **Implementasi e-Court**

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (TI) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan Indonesia telah bertransformasi menuju peradilan yang modern, antara lain dengan melakukan modernisasi pelayanan, yaitu meluncurkan Aplikasi e-Court pada tahun 2018. Dengan peluncuran Aplikasi e-Court diharapkan proses peradilan dapat berjalan secara efisien dan transparan.

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada aplikasi e-Court ialah e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

E-court memiliki payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyebutkan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-Court*. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi.

Layanan *e-Court* sebagai berikut:

1. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

*E-Filing* atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Makamah Agung Republik Indonesia (MARI).

*E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan Tata Usaha Negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara. Aplikasi ini pun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada *e-Filing*. juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam acara replik, duplik dan kesimpulan serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen Tata Usaha Negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format

dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain yang telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-Court.

2. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

3. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi e-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MARI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum

dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

5. *e-Litigasi* (Persidangan Secara elektronik)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat para pihak dan kesimpulan secara elektronik.

6. Putusan Secara Elektronik

*E-Court* memuat Informasi Putusan berupa amar putusan, tanggal putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan yang dapat diunduh melalui aplikasi ini.

➤ **Implementasi SIPP**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP versi 6.0.1 masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website, dimana terdapat fitur-fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat maupun pencari keadilan. SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun

dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

#### **D. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025**

Pengelolaan Persuratan mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar kedinasan sudah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan sebagai inovasi internal yang diberi nama SIAS (Sistem Informasi Administrasi Surat) yang dikelola di Sub Bagian Umum dan Keuangan, kemudian pada bulan Desember tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah efektif menggunakan aplikasi SIMPAN. Adapun data persuratan dari Januari s.d. Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Bagian	Jumlah	
		Surat Masuk	Surat Keluar
	Kesekretariatan		
1	Ketua	363	745
2	Sekretaris	53	583
	Kepaniteraan		
1	Ketua	111	25
2	Panitera	13	229
Jumlah		540	1582

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. ZONA INTEGRITAS**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas sebagai langkah nyata dalam menciptakan lembaga peradilan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang profesional, PTUN Palu berupaya untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang merupakan bentuk implementasi dari program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pencapaian status WBK dan WBBM bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga suatu kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan tata kelola yang baik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja yang dilakukan.

##### **1. Komitmen Penguatan Integritas**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terus berupaya untuk membangun dan memperkuat sistem pengawasan internal yang ketat, dengan meningkatkan kedisiplinan aparaturnya. Setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi, menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas, serta berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak mereka di pengadilan, sehingga mencegah adanya praktik-praktik yang merugikan.

##### **2. Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**

Dalam rangka mencapai WBBM, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Setiap tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan akhir,

diselenggarakan dengan sistem yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang perkara yang sedang berjalan.

### **3. Penguatan Kinerja Organisasi**

Untuk mencapai WBK dan WBBM, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga berfokus pada penguatan kinerja organisasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh aparatur pengadilan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, serta peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik, menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Setiap pegawai didorong untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

### **4. Mencapai Predikat WBK dan WBBM**

Dengan mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu bertekad untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, melalui komitmennya terhadap zona integritas, akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan melayani, serta mewujudkan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang membutuhkan.

Adapun Area Zona Pembangunan pada Zona Integritas sebagai berikut:

1. Area 1 Manajemen Perubahan
2. Area 2 Penataan Tata Laksana
3. Area 3 Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Area 5 Penguatan Pengawasan
6. Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada Tahun 2024, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:114/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berusaha secara maksimal untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinyatakan tidak dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK. Namun demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tetap berkomitmen untuk membangun Zona Integritas untuk tahun 2026.

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan administratif. PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam proses hukum, dengan menyediakan berbagai layanan administrasi dalam satu tempat yang terintegrasi. Dengan adanya PTSP, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai berkas atau proses, melainkan dapat melakukannya di satu loket yang sudah dilengkapi dengan berbagai layanan yang diperlukan.

Selain efisiensi, PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi. Setiap warga negara yang berinteraksi dengan pengadilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pengambilan putusan, dapat merasakan pelayanan yang jelas dan terukur. Petugas yang terlatih di PTSP siap memberikan informasi yang diperlukan terkait prosedur hukum, serta membantu masyarakat dalam memenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kebingungan dalam mengikuti proses hukum yang ada.

Keberadaan PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga sejalan dengan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi masyarakat.

Dengan memfokuskan pada prinsip "satu pintu", layanan ini membantu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Hal ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa administrasi dengan cepat dan efisien, serta menciptakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik merujuk pada penerapan ide-ide kreatif dan solusi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari proses administratif, penggunaan teknologi, hingga pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Tujuan utama dari inovasi pelayanan publik adalah untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah diakses, dan lebih efisien.

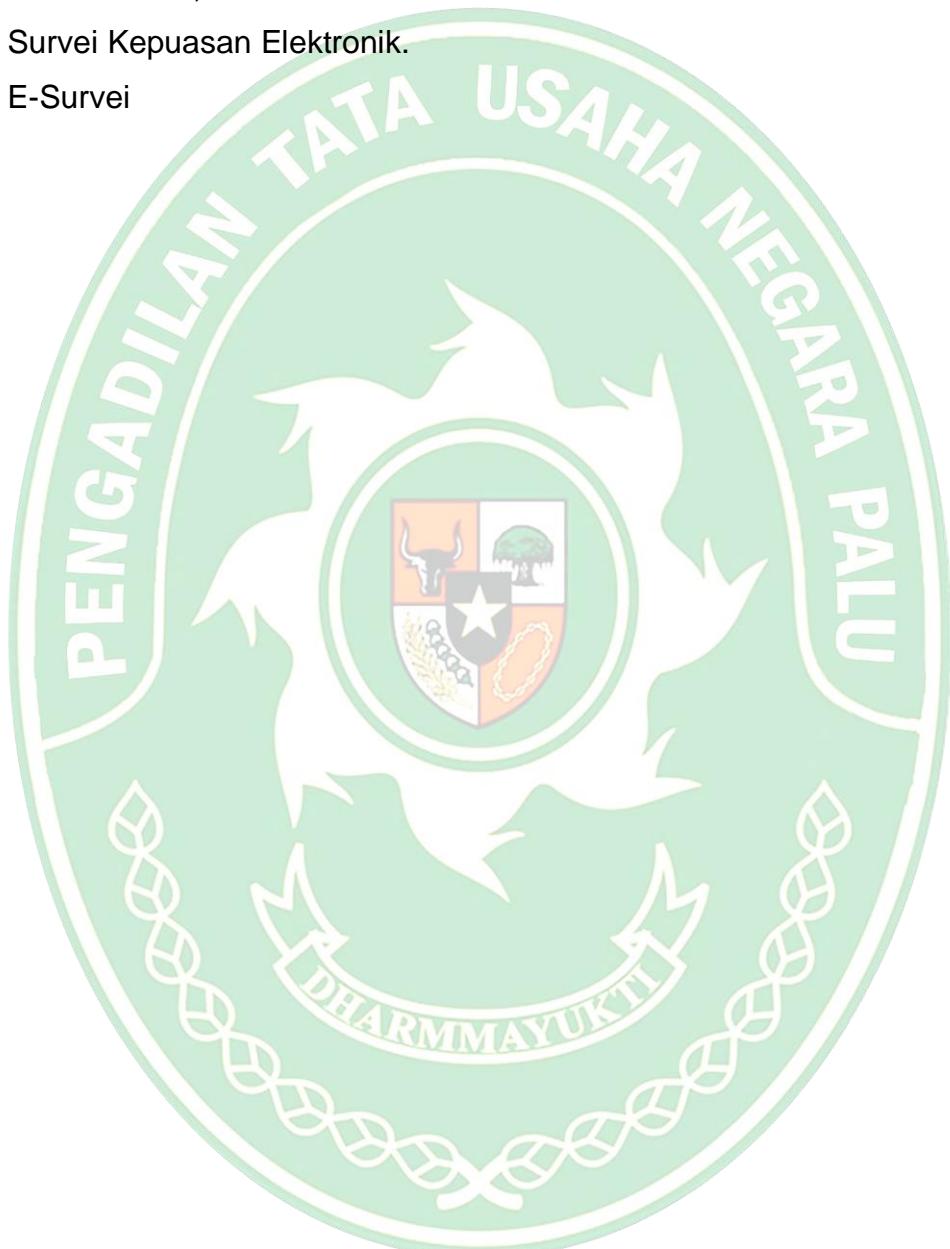
Selain itu, pendekatan berbasis data dan analitik juga menjadi penting dalam inovasi ini. Pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi kinerja layanan yang diberikan. Ini membantu untuk memperbaiki sistem pelayanan secara berkelanjutan.

Inovasi pelayanan publik juga melibatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat pemerintah, agar mereka mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih profesional. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam upaya transformasi layanan publik.

Dengan berbagai inovasi ini, diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih memuaskan bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Beberapa Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

1. Sipesipa (Sistem Pengembalian Sisa Panjar Elektronik);
2. SIAS (Sistem Informasi Administrasi Surat);
3. CICA (Chat Informasi Cepat Akurat);
4. Buku Tamu Elektronik;
5. PTSP Online;
6. Survei Kepuasan Elektronik.
7. E-Survei



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Bahwa setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga Peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melaksanakan pemeriksaan rutin/reguler dalam upaya pengendalian internal.

Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2025 dilaksanakan kegiatan Pembinaan pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sesuai Surat Tugas Nomor 651/KPT.TUN.W4/ST.KP.7.1/IV/2025, tanggal 28 April 2025 menugaskan Tim Pembinaan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang melaksanakan pengawasan adalah H. Iswan Herwin, S.H., M.H., Miskini, S.H., M.H., dan Keli Margono, S.H..

Hasil pengawasan disertai dengan rekomendasi yang ditujukan kepada Pimpinan Pengadilan untuk ditindaklanjuti. Pengawasan rutin reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Peradilan yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok di bagian Kepaniteraan yang mencakup Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.
2. Pelaksanaan tugas pokok di bagian Kesekretariatan yang mencakup Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris dan Administrasi Umum

serta Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. Evaluasi atau penyelenggaraan Manajemen Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Objek Pengawasan meliputi:

1. Manajemen Peradilan yang antara lain:

- a. Program Kerja
- b. Pelaksanaan
- c. Pembinaan
- d. Evaluasi Kegiatan

2. Administrasi Perkara

- a. Prosedur Penerimaan Perkara
- b. Prosedur Penerimaan Banding
- c. Prosedur Penerimaan Kasasi
- d. Prosedur Penerimaan Peninjauan Kembali
- e. Keuangan Perkara
- f. Pemberkasan dan Pengarsipan Perkara
- g. Pelaporan

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- a. Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim
- b. Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara
- c. Minutasi Perkara
- d. Pelaksanaan Putusan

4. Administrasi Umum

- a. Kepegawaian
- b. Keuangan
- c. Inventaris
- d. Perencanaan, TI dan Pelaporan
- e. Perpustakaan, Tertib Persuratan dan Perkantoran

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Pembinaan dan Pengembangan SDM
- b. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Inventaris
- c. Ketertiban, Kedisiplinan dan Ketaatan

- d. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara
- e. Pengaduan Masyarakat

## **B. Evaluasi Pengawasan**

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang disertai dengan rekomendasi yang ditujukan kepada Pimpinan maka sangat penting untuk dilakukan evaluasi untuk menilai apakah rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu untuk digunakan dalam menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan dalam upaya melakukan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan.

Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan dari hasil pengawasan, melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus menerus mengarahkan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan pegawai yang profesional dan berkompetensi maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan perjanjian kinerja dengan Aparatur Pengadilan di awal tahun dan pada akhir tahun akan dilakukan penilaian sesuai dengan perjanjian kinerja pegawai yang telah disepakati.
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai panduan untuk menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pegawai, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai terkait dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki sumber daya manusia berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang termasuk Hakim 11 (sebelas) orang.
4. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 perkara yang masuk sejumlah 75 perkara, sedangkan pada tahun 2025 sejumlah 45 perkara.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana telah memadai namun masih ada yang harus dilakukan penambahan seperti pengadaan meubelair karena masih ada ruangan yang belum tersedia meubelair seperti ruang sidang persiapan dan ruangan serbaguna.
6. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan DIPA 05 dengan realasi 90.90 % terdiri atas 3 (tiga) program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realasi penyerapan anggaran baik belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal rata-rata

mencapai 99.72 % ke atas dan secara keseluruhan persentase anggaran mencapai 99.66 % DIPA 01.

7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengembangan teknologi informasi telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan perangkat teknologi informasi baik berupa penambahan perangkat keras maupun perangkat lunak. Aplikasi yang tersedia adalah Aplikasi SIPESIPA, CICA, dan Aplikasi Buku Tamu Elektronik.
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terarah dengan baik, dan dapat mencapai tujuan akhir dari reformasi dengan melaksanakan program Manajemen Perubahan, melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
9. Pelaksanaan pengawasan Internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selain dilakukan oleh atasan langsung sebagai bentuk pengawasan melekat, juga dilakukan oleh pengawas bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu bertindak selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang. Hasil pengawasan yang direkomendasi dilakukan evaluasi untuk menilai apakah rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.

## B. REKOMENDASI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sangat membutuhkan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti pengadaan meubelair untuk perlengkapan sidang, meja kerja pegawai dan lain-lain.
2. Penambahan kendaraan dinas roda 4 (empat) sejumlah 3 (tiga) unit masing-masing untuk Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris.
3. Penambahan kendaraan roda 2 (dua) sejumlah 6 (tiga) unit untuk pelaksana.

## KEGIATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TAHUN 2025





Pengadilan  
Tata Usaha Negara  
Palu

BerAKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa



KEGIATAN



## PEMBINAAN PTTUN MAKASSAR DI PTUN PALU

7 Mei 2025

SWIPE →

🌐 [www.ptun-palu.go.id](http://www.ptun-palu.go.id)     Pengadilan Tata Usaha Negara Palu    ptunpalu





Pengadilan  
Tata Usaha Negara  
Palu









